



# Sosialisasi Program PEN ke Dewan



ISTIMEWA

**PEMULIHAN:** Wali Kota Singkawang sosialisasi kebijakan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah kepada DPRD Singkawang, Selasa (5/1) di Swissbellinn Hotel.

**SINGKAWANG-**Wali Kota Singkawang beserta jajaran mensosialisasi kebijakan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah kepada DPRD Singkawang, Selasa (5/1) di Swissbellinn Hotel.

Dengan pandemi COVID-19 menyebar keberbagai-bagai-an negara termasuk Indonesia dan Singkawang khususnya. Pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Maka pemerintah telah mengubah peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Singkawang sangat menyambut baik dengan adanya program bantuan pembiayaan keuangan Pemerintah Daerah yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah.

“Sehingga di tengah krisis ekonomi sekarang ini, pemerintah Kota Singkawang dapat tetap memberikan pelayanan dan pembangunan yang baik kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Adapun pinjaman daerah kota Singkawang yang diajukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 200 Milyar dengan jangka waktu 8 tahun dan dalam bentuk pinjaman kegiatan dengan



suku bunga 0 persen.

Tujuan dari pinjaman PEN daerah ini melaksanakan pembangunan terhadap infrastruktur jalan, drainase, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya yang diprioritaskan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat yang selaras dengan program PEN yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Meningkatkan kelayakan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang tetap terjaga.

rencananya distribusi sasaran kegiatan pinjaman PEN ini di bidang Pekerjaan Umum Rp 150 Milyar berupa pembangunan prasarana jalan, sumber daya air, dan urusan bidang pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp 50 Milyar.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah kota Singkawang dalam rangka Pinjaman PEN Daerah sebagai berikut yakni merupakan daerah yang terdampak Covid-19, memiliki program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN.

Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang

akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD sebelumnya, sehingga memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5. Wali Kota Singkawang mengharapkan rekan-rekan dari legislatif mendukung program ini demi pemulihan perekonomian di Kota Singkawang dan kemajuan kota Singkawang serta guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang Menuju Singkawang Hebat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang, Sumastro mengungkapkan dana PEN sebanyak Rp 200 milyar ini akan dikembalikan kepada pemerintah pusat dengan bunga 0% atau nol persen.

Pengembalian ini, kata Sekda, berlangsung dalam kurun waktu selama delapan tahun, terhitung dari tahun 2021. Namun, Sumastro mengatakan Kemenkeu RI memberikan satu fase yang dinamakan grace period atau masa tenggang selama satu tahun.

"Sehingga cicilan dimulai pada tahun 2022 dengan grace period satu tahun, sampai tahun 2028," jelas Sumas-

tro. Dengan masa tenggang satu tahun itu, Pemkot Singkawang akan membayar cicilan selama Dana PEN tujuh tahun ke Pemerintah Pusat. Artinya, lanjutnya, per tahun Pemkot membayar cicilan sebesar Rp 2,8 miliar lebih. Cicilan sebesar Rp 2,8 miliar per tahun ini, dia katakan, akan dikompensasi dengan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulannya, sehingga cicilan akan dibayarkan 2,3 Miliar lebih per bulannya. "Itulah yang nantinya akan terpotong dari penyaluran DAU Pemkot Singkawang setiap bulan. Sekali lagi Dana PEN ini Nol persen bunganya," tegasnya.

Pada kegiatan sosialisasi Dana PEN kepada Anggota DPRD Kota Singkawang, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, Zulhiar mengatakan pada Bidang Pekerjaan Umum terdapat 21 Pembangunan Prasarana Jalan, 10 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air, dan 6 Prasarana Pendidikan.

"Total pembangunan prasarana jalan Rp 115 Milyar, Pembangunan prasarana sumber daya air Rp 35 miliar dan Rp 50 Milyar pada pendidikan," papar Zulhiar pada pertemuan anggota DPRD Kota Singkawang.

Selain dialokasikan untuk

perbaikan sejumlah jalan di Kota Singkawang, Dana PEN yang diajukan Pemkot Singkawang juga dialokasikan pada Pembangunan prasarana Sumber Daya Air. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, Zulhiar mengatakan terdapat 10 lokasi pembangunan sumber daya air ini, diantaranya pembangunan perkuatan tebing Sungai H. Hasan, Pembangunan perkuatan tebing Saluran Primer Sungai Wie, pembangunan perkuatan tebing saluran Jalan Semai, pembangunan perkuatan tebing saluran primer sungai bulan.

Pembangunan perkuatan tebing saluran primer Sungai Setapak Besar, pembangunan perkuatan Tebing Sungai H. Hasan, pembangunan perkuatan Tebing Saluran Primer Sungai Wie, pembangunan perkuat tebing Saluran Jalan Semai, pembangunan perkuat saluran primer Sungai Bulan, pembangunan perkuat tebing saluran primer Sungai Setapak Besar.

Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Muhammadiyah mengatakan, program PEN adalah merupakan program terbaik dalam menyelesaikan pemerataan pembangunan di Kota Singkawang.

"Wali Kota Singkawang sudah mengambil langkah yang baik dalam percepatan pembangunan," katanya. Menurutnya, pandemi Covid-19 terhadap dampak ekonomi bagi masyarakat akan sangat besar, dimana akses jalan nantinya akan banyak terselesaikan karena mengharapkan dana APBD sangat mustahil pembangunan bisa diselesaikan dengan keterbatasan anggaran. "Maka program inilah yang bisa menyelesaikan daerah akses jalan pinggiran yang belum tembus konstruksi jalan dari mulai berdiri Kota Singkawang bisa diselesaikan sekarang seperti, jalan Haji Bakar, Hamid Matali, Mentoman, Mayasopa, Malindo dan jalan-jalan rusak lainnya termasuk dalam kota," ujarnya. (har)